BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan untuk menjalankan roda perekonomian, Indonesia sebagai negara berkembang yang terus mengalami berbagai kemajuan dalam bidang ekonomi memiliki tiga pelaku kegiatan ekonomi yaitu antaranya Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut sangat diharapkan dapat berkontribusi dengan baik untuk kemajuan perekonomian negara indonesia. Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang berperan penting dalam sektor ekonomi harus mampu mandiri dan mengelola usahanya dengan baik agar dapat memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian di Indonesia. Koperasi merupakan suatu organisasi yang didirikan atas dasar gotong royong sekaligus menerapkan asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :

> **"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan".**

Berdasarkan pasal diatas, maka koperasi adalah salah satu badan usaha yang cocok untuk ditetapkan dalam kondisi saat ini karena koperasi merupakan sistem ekonomi kerakyatan yang kegiatan usahanya tumbuh dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kedudukan koperasi di Indonesia dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian menegaskan bahwa :

> **"Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".**

Pernyataan diatas sudah jelas bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya berdasaskan atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan salah satu organisasi ekonomi yang paling tepat dan menjadi alternatif terbaik dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan ekonomi. Sangat diharapkan keberadaan koperasi di Indonesia mampu mengembalikan keadaan ekonomi yang sedang mengalami pasang surut seperti saat ini.

Suatu koperasi dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan Sumber Daya Manusia yang baik pula. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari suryani dkk (2008:115) yang menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang bersifat gotong royong sehingga supaya pengelolaannya berjalan dengan baik koperasi perlu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. Berkembang tidaknya koperasi sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Untuk meningkatkan pengembangan koperasi maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta berkompeten. Peranan Sumber Daya Manusia dalam koperasi baik sebagai anggota, pengurus, pengawas, maupun karyawan perlu

dikelola dengan baik agar tujuan koperasi dapat tercapai dan mampu bersaing dengan koperasi lainnya.

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pengurus. Pengurus merupakan subjek, peran yang fundamental, dan pemegang kendali pengawasan terhadap suatu koperasi. Kemajuan koperasi sangat ditentukan oleh sejauh mana peran pengurus pada koperasi tersebut. Mengingat begitu pentingnya peran pengurus terhadap koperasi, maka pemberian pelatihan merupakan hal yang penting dalam upaya meningkatkan pemahaman pengurus terhadap koperasi, sehingga dengan memahami perkoperasian, diharapkan kompetensi pengurus dapat meningkat. Suatu koperasi akan berhasil dan efektif apabila ditopang oleh pengurus yang berkualitas yang memiliki kompetensi baik, karena kompetensi pengurus yang menurun dapat menghambat tercapainya tujuan atau target yang diharapkan oleh koperasi. Penurunan kompetensi pengurus salah satunya dipengaruhi oleh faktor kebutuhan pelatihan.

Kompetensi karyawan yang terdiri dari pengetahuan *(knowledge*), kemampuan/keterampilan *(skill)*, sikap *(attitude)*, dan situasi *(situation)*. Kompetensi merupakan faktor kunci penentu bagi seseorang dalam menghasilkan kinerja yang sangat baik. Dalam situasi kolektif, kompetensi merupakan faktor kunci penentu keberhasilan organisasi (Sedarmayanti, 2007:127). Untuk mendapatkan pengurus yang berkompeten, perusahaan perlu memberikan pelatihan terhadap pengurus agar pengurus koperasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik tujuan koperasi dapat tercapai.

Salah satu upaya meningkatkan kompetensi pengurus maka koperasi perlu mengadakan pelatihan untuk pengurus koperasi tersebut, dengan pelatihan akan memberikan pengetahuan keterampilan, dan kecakapan. Dari upaya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk koperasi.

Program pelatihan yang diselenggarakan harus sesuai dengan kebutuhan koperasi. Pengetahuan dan pemahamam pengurus terhadap koperasi juga ikut mempengaruhi kompetensi pengurus, sehingga perlu dilaksanakan analisis kebutuhan pelatihan agar pihak koperasi dapat mengetahui sejauh mana program pelatihan dalam upaya meningkatkan pemahaman pengurus terhadap perkoperasian. Analisis kebutuhan pelatihan tersebut dikenal dengan *Trainning Needs Assesment* (TNA).

Menurut Kaufman (dalam Kaswan, 2011:58) *Trainning Needs Assesment* (TNA) merupakan proses formal yang mengidentifikasi kebutuhan pelatihan sebagai kesenjangan (gap) antara hasil sekarang dengan hasil yang diharapkan, yang menempatkan kebutuhan itu pada urutan prioritas yang didasarkan pada biaya untuk memenuhi tiap-tiap kebutuhan dibandingkan biaya mengabaikannya, dan menyeleksi kebutuhan pelatihan yang paling penting pengurangan dan penghapusan.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Paguyuban Sejahtera. Koperasi Paguyuban Sejahtera Berbadan Hukum Nomor : 082/BH.XIII.8/DP2KU/VI/2012 pada Tanggal 14 Juni 2012. Koperasi ini berlokasi di Kp.Sukarapih Rw.04 Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Jawa Barat. Koperasi Paguyuban Sejahtera dikelola oleh 4 orang pengurus, 1 orang pengawas, dan 3 orang karyawan

adapun usaha yang dijalankan Koperasi Paguyuban Sejahtera ini untuk memenuhi dan melayani kebutuhan anggota yaitu :

1. Simpan Pinjam
2. Tabungan Anak dan Tabungan Masa Depan
3. Penjualan Gas LPG
4. Penjualan Sembako/Retail dan Paket Lebaran
5. Jasa Listrik, BRI Link, MANDIRI Link

Dalam kegiatan usahanya koperasi ini selain melayani anggota juga melayani kegiatan usaha dengan non anggota, hanya unit usaha simpan pinjam saja yang dikhususkan untuk anggota, sedangkan sisanya bisa dimanfaatkan oleh anggota dan non anggota atau bisa disebut sebagai unit usaha masyarakat umum.

Untuk melakukan pekerjaan di Koperasi Paguyuban Sejahtera tidak dipatok pada tingkat pendidikannya, tetapi diharapkan para pengurus memahami tentang perkoperasian, dengan begitu para pengurus dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Kompetensi yang dimiliki pengurus merupakan landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina, dan mengembangkan kemampuan pengurus untuk mencapai keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada anggota.

Kompetensi yang kurang baik yang dimiliki pengurus secara tidak langsung akan menghambat kinerja pengurus dan pelayanan kepada anggota, menurut hasil observasi yang telah dilakukan kurangnya kompetensi yang dimiliki pengurus kerap kali menimbulkan kekeliruan yang ditemukan yaitu dalam penyusunan laporan Rapat Tahunan Anggota masih kurang teliti hal tersebut mengakibatkan

sering mengulang kembali hasil pekerjaannya bahkan masih mengalami keterlambatan dan kurang nya mengerti IT sehingga koperasi ini masih mengandalkan orang dari luar untuk penyusunan laporan Rapat Anggota Tahunan serta dalam Penjualan retail dan Paket lebaran sering sekali mengalami selisih setiap tahunnya, Dengan begitu menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki pengurus Koperasi Paguyuban Sejahtera memang dapat dikatakan kurang. Kompetensi yang dimiliki pengurus belum bisa tercapai pada Koperasi Paguyuban Sejahtera diduga karena kurang nya keterampilan yang dimiliki pengurus, kurangnya edukasi mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus serta kurangnya pelatihan bagi pengurus yang didasari atas kebutuhan. Dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi pengurus Koperasi Paguyuban Sejahtera perlu adanya pelatihan mengenai hal-hal yang diduga menyebabkan kurangnya kompetensi pengurus tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi pengurus sebagai dasar pemenuhan kinerjanya maka perlu mengadakan penilaian kebutuhan pelatihan bagi pengurus, agar pengurus bisa lebih kompeten dalam bekerja sehingga kinerjanya dapat terpenuhi dengan maksimal. Adanya penilaian kebutuhan pelatihan diharapkan akan diketahui kebutuhan pelatihan apa yang sesuai dengan peningkatan keterampilan kerja, pemahaman kerja mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus, yang sesuai dengan kebutuhan pengurus Koperasi Paguyuban Sejahtera.

Pelaksanaan pelatihan pada Koperasi Paguyuban Sejahtera yang selama diikuti/dilaksanakan cenderung didasari atas faktor kerjsama antara koperasi dengan pihak kedua. Berikut merupakan rekapitulasi pelatihan yang diikuti

pengurus Koperasi Paguyuban Sejahtera dari tahun 2017-2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM :

Tabel 1.1
Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2017-2021

Tahun	Tanggal	Banyaknya Orang	Jenis Kegiatan
2017	21-23 Agustus	1 Orang	Pelatihan Perkoperasian dan Pemahaman Perundang-Undangan
2018	30 September	7 Orang	Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Anggota Dekopinda
2019	28-29 Januari	2 Orang	Sosialisasi Prinsip Pemahaman dan Pengendalian Intern
2020	19 Agustus	3 Orang	Implementasi Pencatatan Keuangan Koperasi dengan Aplikasi SMART KOPERASI
2021	1-3 Maret	1 Orang	Uji Kompetensi Juru Buku dan Juru Kasir

Sumber : Koperasi Paguyuban Sejahtera

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa sudah diadakannya pelatihan bagi pengurus pada Koperasi Paguyuban Sejahtera yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, pelatihan yang diikuti ini sepintas sudah sesuai dengan kebutuhan para pengurus. Namun perlu diteliti, kesesuaian, frekuensi atau kedalamannya pelatihannya apakah sudah sesuai kebutuhan?

Adakah kebutuhan pelatihan lain agar dapat lebih meningkatkan keterampilan dan pemahaman pengurus?

Para pengurus yang mengikuti pelatihan tiap tahunnya sudah sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing, namun dibalik itu sudah mengikutinya pelatihan tetapi masih begitu-begitu saja kinerjanya masih kurang meningkat. Oleh karena itu jika dilihat dari pelaksanaan pelatihan yang diikuti pengurus mengindikasikan bahwa Koperasi Paguyuban Sejahtera perlu meninjau dan melakukan penilaian kebutuhan pelatihan yang memang benar-benar dibutuhkan pengurus. Pengurus yang bekerja pun ada yang memegang lebih dari dua pekerjaan, dengan begitu diperlukannya keterampilan pengurus pada masing-masing pekerjaan yang dijalankan.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan pelatihan yang mengikut sertakan pengurus Koperasi Paguyuban Sejatera pada pelatihan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut diduga masih belum bisa menjamin peningkatan keterampilan dan kompetensi pengurus. Dengan demikian Koperasi Paguyuban Sejahtera perlu meninjau ulang kebutuhan pelatihan bagi pengurus berdasarkan jenis pekerjaan yang dijalankan, pengurus juga melaksanakan pelatihan tidak hanya bergantung pada kerjasama antara koperasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

Tabel 1.2
\Tingkat Pendidikan Pengurus Koperasi Paguyuban Sejahtera Kabupaten Garut

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	SD	-
2.	SMP	-
3.	SMA	2
4.	Perguruan Tinggi (D3)	2

Sumber : Koperasi Paguyuban Sejahtera

Pada dasarnya pendidikan tidak selalu menjadi faktor penyebab dari kurangnya kemampuan pengurus, karena belum tentu pengurus dengan pendidikan S1 lebih mampu dibanding pengurus lulusan SMA. Akan tetapi fakta dilapangan berdasarkan hasil observasi pada koperasi paguyuban sejahtera dengan pendidikan SMA dan pendidikan D3 kurang berkompetensi dalam koperasi.

Memberikan pelatihan yang efektif dan menjadikan pelatihan sebagai suatu solusi yang tepat bagi permasalahan koperasi sangat penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan koperasi dalam jangka panjang karena pelatihan akan memperbaiki kekurangan keterampilan dan kreatifitas serta akan menyelesaikan tugas secara maksimal pada Koperasi Paguyuban Sejahtera.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2009:16) pelatihan berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan karyawan yang sudah menduduki jabatan atau tugas tertentu.

Penelitian mengenai analisis kebutuhan pelatihan telah dilaksanakan oleh para peneliti, antara lain sebagai berikut : *Trainning Needs Assesment* Dalam Rangka Merumuskan Materi Pelatihan Yang Sesuai Bagi Kebutuhan Pelatihan

Anggota Pada Koperasi Serba Usaha Cilengkrang, Cibiru, Bandung oleh Risna Nurul Aini (2018). Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa kurangnya pemahaman anggota terhadap koperasi berdampak buruk bagi partisipasi anggota sehingga anggota seolah tidak merasakan perannya sebagai pemilik dan pelanggan. Maka pengurus KSU "cilengkrang" akan menghubungi pihak perkoperasian untuk bekerja sama serta meminta kesediannya untuk menjadi pelatih, sehingga program pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi anggota dapat terlaksana. Akan tetapi belum ada kesiapan dari anggota untuk berkontribusi untuk melaksanakan pelatihan oleh karena itu, program pelatihan akan tetap dilaksanakan. Lalu penelitian yang kedua oleh Tafenda Rahmansyah Dwi (2016) yang menunjukan bahwa program pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan PDAM Kota Malang dapat meningkatkan kompetensi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Koperasi Paguyuban Sejahtera mengingat kebutuhan pelatihan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kompetensi pengurus maka peneliti bermaksud ingin mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana kebutuhan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi pengurus. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membahas mengenai :

"Analisis Kebutuhan Pelatihan Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Pengurus Koperasi".

(Studi kasus pada Koperasi Paguyuban Sejahtera Kabupaten Garut).

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka penulis bermaksud menidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi pengurus di Koperasi Paguyuban Sejahtera Kabupaten Garut?
2. Bagaimana kebutuhan pelatihan pengurus di Koperasi Paguyuban Sejahtera Kabupaten Garut?
3. Bagaimana upaya Koperasi Paguyuban Sejahtera Kabupaten Garut dalam meningkatkan kompetensi pengurus melalui kebutuhan pelatihan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan pentingnya analisis kebutuhan pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi pengurus koperasi pada Koperasi Paguyuban Sejahtera Kabupaten Garut.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui :

1. Kompetensi pengurus di Koperasi Paguyuban Sejahtera Kabupaten Garut.
2. Kebutuhan pelatihan pengurus di Koperai Paguyuban Sejahtera Kabupaten Garut.
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan koperasi terhadap kebutuhan pelatihan pengurus dalam upaya meningkatkan kompetensi pengurus pada Koperasi Paguyuban Sejahtera Kabupaten Garut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna secara langsung maupun tidak terhadap dua aspek, yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

a. Penelitian, sebagai acuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan dalam meneliti, menelaah serta mengalisis suatu permasalahan dan sebagai cara untuk menggunakan metode dan ilmu yang telah dipelajari.
b. Peneliti lain, sebagai bahan informasi awal dan masukan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan lebih mendalam atau dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu penelitian selanjutnya.
c. Menambah referensi dan memperkaya khasanah pengembangan ilmu koperasi pada umumnya serta bidang manajemen sumber daya manusia pada khususnya mengenai kebutuhan pelatihan dan kompetensi pengurus.

1.4.2. Aspek Guna Laksana

a. Bagi Koperasi yang diteliti, sebagai bahan masukan, kajian dan eveluasi bagi Koperasi Paguyuban Sejahtera tentang kebutuhan pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi pengurus koperasi yang ada sekarang guna untuk menjalankan kegiatan usaha melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Serta sebagai bahan masukan untuk membantu para pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan terkait permasalahan yang diteliti.
b. Bagi University yang terkait, sebagai dasar dalam melakukan pembinaan guna meningkatkan dan mengembangkan koperasi.